

Dinamika Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024: Tinjauan Terhadap Konfigurasi Politik PDIP dan PKS

Bapthista Mario Yosryandi Sara¹, Safrizal Rambe²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta

Email: marioyosryandi30@gmail.com¹ safrizal.rambe@civitas.unas.ac.id²

Abstrak

Sejatinya, Pemilu 2024 adalah pijakan atas dinamika demokrasi elektoral Indonesia di tengah krisis oposisi yang kian mengkhawatirkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang selama dua periode mendominasi kursi eksekutif dan legislatif, sekarang harus menentukan posisi politiknya di tengah penurunan dukungan elektoral di basis tradisionalnya. Pilihan antara berada di lingkaran kekuasaan melalui kompromi koalisi atau mundur ke barisan oposisi, untuk memulihkan citra ideologis, menjadi suatu dilema yang serius. Demikian juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini diperhadapkan di tengah persimpangan jalan; antara bertahan sebagai oposisi yang sejauh ini menjadi mesin perlawanan, atau bergabung dalam koalisi dengan kalkulasi pragmatis ketika mengamankan sumber daya politiknya. Karena itu, tulisan ini menelaah dinamika tersebut melalui analisis teori oposisi, teori koalisi rasional, serta patronase politik yang menjelaskan betapa cairnya garis demarkasi oposisi dan koalisi pada pusingan politik Indonesia sesudah reformasi. Hasil kajian ini menjelaskan, hakikatnya konfigurasi politik PDIP dan PKS pasca Pemilu 2024, menjadi salah satu aspek krusial pada kualitas demokrasi Indonesia. Jika kedua partai ini bergabung dalam koalisi besar, maka ruang oposisi substantif akan menyempit, dan turut melemahkan *check and balance* demokrasi prosedural. Dengan demikian, pergeseran politik PDIP dan PKS tidak sebatas strategi kekuasaan, melainkan pertarungan masa depan demokrasi Indonesia di bawah kekuasaan rezim Prabowo-Gibran.

Kata Kunci: *Demokrasi; Koalisi; Konfigurasi Politik; Oposisi; PDIP; Pemilu 2024; PKS*

Abstract

The 2024 Election marks a crucial turning point for Indonesia's electoral democracy, occurring amid an increasingly alarming opposition crisis. The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), after two terms of dominance in both executive and legislative branches, faces declining support in its traditional strongholds. It must now decide between joining the ruling coalition to remain within the circle of power or repositioning itself in opposition to reclaim its ideological identity. The Prosperous Justice Party (PKS) also stands at a crossroads. Having long distinguished itself as an opposition force, PKS must weigh the benefits of maintaining that stance against the pragmatic option of entering a coalition to secure greater political resources. This paper analyzes these dilemmas through opposition theory, rational coalition theory, and political patronage, which highlight the fluid boundaries between opposition and coalition in post-reform Indonesian politics. The findings suggest that the configuration of PDIP and PKS after the 2024 Election is pivotal to the quality of Indonesia's democracy. Should both parties join a grand coalition, the substantive space for opposition will shrink, weakening the mechanisms of checks and balances. Thus, the repositioning of PDIP and PKS extends beyond tactical power struggles and represents a broader gamble on the future of Indonesian democracy under Prabowo Subianto's administration.

Keywords: *2024 Election; Coalition; Democracy; Opposition; PDIP; PKS; Political Configuration*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan suatu pertanda di tengah hingar-bingar demokrasi elektoral Indonesia pasca reformasi, bahwa terdapat persoalan praktik koalisi dan oposisi. Seyogyanya dalam sistem presidensial multipartai seperti di Indonesia, kelompok koalisi seringkali dibangun tidak semata karena kedekatan ideologis, tetapi karena kalkulasi distribusi sumber daya politik (Aspinall & Berenschot; 2019). Fenomena ini kiranya semakin memperkuat patronase sebagai jantung pengaturan relasi antar-elite, melemahkan demarkasi oposisi dan koalisi itu sendiri. Sejak kejatuhan orde baru (orba), relasi kekuasaan di Indonesia masih bergerak berdasarkan aspek *pragmatic coalition-building* yang diwarnai *rent-seeking* (Hadiz; 2004). Hal tersebut, menjadikan partai politik bertransformasi bukan semata-mata alat politik yang bisa mengartikulasi kepentingan rakyat, tetapi juga sebagai saluran mobilitas sumber daya untuk mempertahankan oligarki (Mietzner; 2013, Winters; 2011).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang merupakan partai nasionalis berideologi marhaenisme warisan Sukarno, tidak luput dari jerat dilema demikian. Setelah dua dekade mendominasi perhelatan Pemilu hingga tahun 2024, tetapi hasilnya menunjukkan kemunduran elektoral di basis tradisionalnya, terutama di Jawa Tengah . Situasi ini memaksa Partai besutan Megawati Sukarnoputri tersebut, menghadapi opsi diplomatis; apakah akan mempertahankan pragmatisme koalisi atau bertransformasi menjadi oposisi ideologis untuk memulihkan basis politik dan kekuatan massa? Di lain sisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dihadapkan atas dilema serupa, meski memiliki basis ideologis yang lebih solid sebagai partai “Islam Modernis”. Namun di lain pihak, PKS memiliki rekam jejak memainkan taktik oposisi moralnya, merawat identitas gerakan politik Islam pasca reformasi. Selain itu, rekam jejak keterlibatan PKS di masa kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama satu dekade (2004-2014), misalnya, menunjukkan pragmatisme partai tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari politik patronase dan logika *power-sharing*.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan reflektif; Dimanakah letak komitmen ideologis partai politik di Indonesia?; Apakah praktik oposisi dan koalisi merupakan arena kompromi untuk meredam pertarungan antar-elite?; Ataukah rangkaian dari proses

untuk mewujudkan demokrasi substantif? Sebagaimana Sartori (1976) menegaskan, sejatinya oposisi merupakan syarat minimum demokrasi modern. Tanpa oposisi yang efektif, parlemen hanya berfungsi layaknya *rubber stamp* (stempel). Dengan demikian, membaca arah politik PDIP dan PKS setelah Pemilu 2024 tidak saja membaca taktik atau siasat jangka pendek kekuatan kedua partai ini. Namun sebaliknya, membaca masa depan demokrasi Indonesia di tengah gempuran dominasi koalisi super besar (*oversized coalition*) yang berpotensi mereduksi fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan (Mietzner; 2020). Maka, artikel ini bertujuan untuk membedah disparitas tersebut, dengan memanfaatkan kerangka teori oposisi, koalisi, serta patronase politik, disertai refleksi kritis atas implikasi bagi masa depan demokrasi prosedural Indonesia pasca Pemilu 2024.

Namun, di tengah kepadatan kajian mengenai partai politik dan demokrasi elektoral di Indonesia, terdapat sejumlah *research gap* yang masih luput disentuh secara memadai. Pertama, literatur dominan lebih banyak menyoroiti perilaku partai dalam konteks kontestasi elektoral, tetapi kurang mengurai bagaimana konfigurasi oposisi–koalisi pasca-Pemilu benar-benar bekerja sebagai mekanisme institusional yang memengaruhi kualitas demokrasi substantif. Kedua, studi mengenai PDIP dan PKS umumnya berhenti pada analisis orientasi ideologis atau strategi elektoral masing-masing, tetapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kedua partai ini memosisikan diri dalam lanskap *oversized coalition* yang kian mengaburkan batas antara koalisi pemerintahan dan oposisi. Ketiga, meskipun kajian patronase politik telah berkembang pesat, relasinya dengan melemahnya oposisi formal dan transformasi parlemen menjadi arena “akomodasi elite” masih belum banyak diteliti secara empiris.

Keempat, terdapat kekosongan analitis terkait bagaimana keputusan politik PDIP dan PKS setelah Pemilu 2024 dapat dibaca bukan sekadar sebagai manuver pragmatis, melainkan sebagai indikator lebih luas tentang reorientasi peran partai dalam menjaga—atau justru menggerus—fungsi pengawasan demokratis di bawah tekanan konsolidasi kekuasaan eksekutif. Dengan mengisi celah tersebut, artikel ini tidak hanya memeriksa dinamika taktis kedua partai, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis-empiris bagi diskursus tentang masa depan demokrasi prosedural Indonesia dalam bayang-bayang dominasi koalisi super besar.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*) serta kajian wacana (*discourse analysis*). Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini tidak bermaksud menghasilkan generalisasi, tetapi bentuk penjelasan mendalam (*in-depth explanation*) terhadap dinamika antara pilihan politik PDIP dan juga PKS sesuai konfigurasi politik pasca pemilu 2024. Sebagai kerangka epistemologis, analisis ini berpijak pada perspektif institusionalis (Hadiz; 2004, Törnquist; 2002) yang memandang partai politik tidak hanya institusi demokrasi formal, namun sebagai aktor yang beroperasi seturut logika patronase dan relasi klientelistik yang melekat pada demokrasi elektoral, yang salah satunya Indonesia. Dengan itu, pembacaan arah politik PDIP dan PKS tidak semata-mata dilihat dari kalkulasi elektoral yang formal, tetapi perlu ditinjau berdasarkan aspek *underlying structures* berupa jejaring oligarki, distribusi rente, dan pembentukan koalisi yang pragmatis (Winters; 2011, Aspinall & Berenschot; 2019).

Data dan bahan kajian dalam penelitian ini, didapatkan melalui dokumen sekunder, yang meliputi hasil publikasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perolehan suara partai pada pemilu 2024. Kemudian artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan riset, dan sumber berita daring yang kredibel sebagai sumber kontekstual. Selanjutnya, metode analisis menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang bertujuan memahami narasi antar-elite partai, ketika dikonstruksi dalam ruang publik, serta bagaimana narasi tersebut merefleksikan posisi strategis partai (PDIP dan PKS) di persimpangan gerbong oposisi dan koalisi. Dalam konteks ini, aktor yang dianalisis mencakup elite inti (*core elites*) kedua partai, yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua DPP bidang politik, serta juru bicara resmi partai yang secara konsisten memproduksi wacana publik terkait sikap politik pasca-Pemilu 2024.

Selain dari itu, analisis juga mencakup pernyataan politisi kunci, dari masing-masing partai, dikarenakan posisi mereka memungkinkan artikulasi wacana yang lebih operasional mengenai pilihan oposisi atau koalisi. Termasuk pula komentar dan *framing* dari tokoh senior non-struktural atau elite simbolik. Misalnya presiden partai, dewan kehormatan, atau figur ideologis yang seringkali digunakan untuk memberikan legitimasi historis dan moral terhadap arah politik partai. Dengan demikian, AWK tidak hanya

memeriksa pernyataan-pernyataan individual, tetapi juga relasi kuasa, konteks institusional, serta strategi bahasa yang digunakan elite PDIP dan PKS untuk menegosiasikan posisi politik mereka dalam lanskap koalisi super besar pasca-Pemilu 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Oposisi sebagai Pilar Demokrasi Substantif

Dalam kerangka teori politik klasik, keberadaan oposisi merupakan prasyarat minimal berjalannya demokrasi yang sehat dan substantif. Giovanni Sartori, secara tegas menekankan bahwa esensi demokrasi terletak pada kompetisi terorganisasi dan mekanisme kontrol timbal balik antara partai pemerintah dan oposisi: “*The very essence of democracy is the organized competition and reciprocal control between governing and opposition parties*” (Sartori; 1976, Ambardi; 2009). Oposisi tidak berhenti sebagai lawan politik yang antagonistik, tetapi fungsi institusionalnya adalah sebagai *watchdog* yang akan mencegah konsentrasi kekuasaan, membuka ruang deliberasi kebijakan, sekaligus mengartikulasikan aspirasi minoritas politik yang tidak terwakili di lingkaran eksekutif (Dahl; 1971, Norton; 2008).

Teori *polyarchy* dari Robert Dahl (1971), menegaskan jika pluralitas kekuatan politik, kebebasan berserikat, kebebasan pers, dan juga kompetisi elektoral, hanyalah prosedur formal belaka apabila tidak diikuti dengan oposisi yang benar-benar independen. Sebab tanpa oposisi efektif, mekanisme *accountability* akan lumpuh karena parlemen kehilangan fungsi deliberasi kritis dan kontrol substantif atas eksekutif (Schedler; 1998). Hal ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi seperti *façade democracy*; suatu demokrasi prosedural dengan rutinitas pemilu meskipun meniadakan pertanggungjawaban yang sebenarnya. Berkaca dari konteks di Indonesia, persoalan oposisi itu melekat pada karakter sistem presidensial yang dikawinkan dengan multipartai ekstrem (Lijphart; 2012). Fenomena *rainbow coalition* pasca pemilu 2014 hingga 2019 contohnya, menunjukkan bagaimana partai-partai lebih memilih posisi di dalam lingkaran kekuasaan daripada memegang peran oposisi yang substantif. Logika *power-sharing* semacam demikian akhirnya menciptakan situasi menjadi bumerang. Sejatinnya,

pemerintahan tampak stabil secara prosedural, tetapi mengalami disparitas kontrol politik.

Pemilu 2024, seyogyanya merupakan momentum uji vitalitas demokrasi Indonesia. Apabila PDIP memilih untuk tetap “di orbit kekuasaan” meskipun kalah dalam pilpres, maka peluang terbentuknya oposisi fundamental akan sangat tipis. Namun kenyataannya, setelah Pilpres 2024 PDIP menunjukkan manuver politik yang kompleks dan cenderung menghindari label oposisi. Dalam pidato penutupan Kongres VI PDIP di Bali, Megawati telah menegaskan PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi atau sebagai bagian dari koalisi, melainkan “partai penyeimbang” dalam rangka menjaga arah pembangunan agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat (*Detiknews*, 02/08/2025). Megawati pun menyatakan, sistem presidensial Indonesia, menurutnya, “tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi” dalam pengertian absolut, melainkan dinamika politik yang lebih cair. Pernyataan ini mengindikasikan, PDIP sedang berupaya menghindari posisi antagonistik penuh sebagai oposisi, dan memilih strategi *middle path* atau netral dan kritis. Sebagaimana terminologi teori oposisi modern, ini bisa disebut juga “oposisi setengah jalan (semi-oposisi)” atau “oposisi yang loyal terhadap kebenaran,” bukan partai penentang yang mutlak. Strategi ini mirip dengan pola *oppositional balancing* di mana partai memilih berdiri di luar pemerintahan formal, namun masih menjaga hubungan kerja dan komunikasi agar dapat berkontribusi seturut kebijakan pemerintahan ketika relevan.

Langkah PDIP itu, juga direspons oleh partai lain di arena politik. Golkar, misalnya, menyatakan menghormati sikap PDIP sebagai partai penyeimbang. PKB tidak ketinggalan, secara resmi menyebut, Megawati berhak menentukan posisi PDIP. Dan jika keputusan PDIP “bukan partai oposisi, bukan juga partai pemerintah” dihormati sebagai bagian kedaulatan internal partai. Adapun Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Andreas Hugo, yang menegaskan, PDIP melihat dirinya sebagai penyeimbang yang memberikan *second opinion* pada kebijakan pemerintah (*Detiknews*, 02/08/2025). Dengan begitu, PDIP tampak memilih strategi kontrol politik yang *hybrid*. Artinya, tidak secara total keluar dari pusaran kontrol pemerintahan (sejauh mana kebijakan pro-rakyat dijalankan), tetapi aktif menjaga jarak agar tidak terlalu bergantung terhadap kegunaan koalisi kekuasaan. Siasat ini menggambarkan persoalan klasik partai besar yang

kehilangan akses kekuasaan di eksekutif, antara menjadi oposisi (resiko dimarginalisasi) atau berupaya mempertahankan pengaruh (risiko dikooptasi).

Di sisi lain, posisi PKS lebih tradisional diarahkan ke peran oposisi. Setelah Pilpres 2024 PKS, melalui Majelis Syura dan keputusan internal, membahas apakah akan mengambil langkah koalisi atau konsisten sebagai oposisi. Bahkan Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS di DPR RI, menyampaikan apabila partainya “tidak masalah menjadi oposisi ataupun koalisi, tergantung dinamika politik dan keputusan musyawarah Majelis Syura” (*Antara News*, 29/ 04/2024). Pernyataan tersebut mempertegas, ihwal PKS tidak memosisikan diri secara kaku layaknya oposisi absolut. Sebaliknya, fleksibel seturut strategi politik partai. Meski begitu, orientasi PKS tetap condong ke kontrol kritis daripada kolaborasi di eksekutif. Di berbagai kesempatan, tidak luput PKS menekankan oposisi bukanlah penolakan total terhadap negara, bisa dipahami sebagai mekanisme kawalan terhadap penyimpangan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Helmke (2009), seyogyanya oposisi sejati mesti mempunyai legitimasi sosial politik, serta keberanian institusional.

Dinamika saat ini, turut memperkuat argumen teori, bahwa oposisi yang efektif tidak melulu identik dengan penentangan frontal, tetapi bisa berbentuk peran “penyeimbang kritis” (*critical balancer*), selama ia memiliki keleluasaan institusional, kemandirian ideologis, dan keberanian berseberangan saat diperlukan. Jadi sesuai perbandingan PDIP dan PKS pasca Pemilu 2024, sejatinya PDIP menempuh strategi *middle ground* — “penyeimbang” — yang memungkinkan fleksibilitas dukung-kritik, namun berpotensi melemahkan posisi kontrol jika terlalu diferensial terhadap kekuasaan. PKS, mempertahankan orientasi oposisi kritis dengan membuka kemungkinan kerja sama, tetapi tetap menegaskan bahwa fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah adalah tugas utama oposisi organik. Strategi PDIP dan PKS tersebut menjadi contoh empiris betapa teori oposisi (termasuk konsep *loyal opposition*, *cartel party*, atau *hegemonic power-sharing*) sangat relevan untuk menganalisis bagaimana partai-partai besar memainkan posisi kekuasaan dan kontrol terhadap demokrasi presidensial multipartai di Indonesia.

Mengingat, perjalanan politik sesudah reformasi, problematisasi oposisi bukan hanya erat kaitannya dengan perhitungan elektoral jangka pendek, tetapi juga soal

moralitas politik dan keberanian institusional partai sehingga tetap di luar kekuasaan meskipun beresiko secara finansial dan politik (Aspinall & Mietzner; 2019). Apabila tidak, demokrasi Indonesia hanya terjebak dalam kubangan *defective democracy*. Bahwa institusi pemilu ada, namun substansi *accountability* dan kontrol horizontal hilang, membuat parlemen berpotensi menjadi *rubber stamp* bagi dominasi oligarki (Buehler; 2013). Karenanya, komitmen PDIP maupun PKS untuk memainkan peran strategis pasca pemilu, yang membuat *litmus test*. Apakah demokrasi Indonesia mampu melawan gejala *hegemonic power sharing* atau akan terjerumus di dalam praktik *cartel party* (Katz & Mai; 1995) yang mampu mereduksi oposisi layaknya ornamen prosedural.

Sirkulasi Klientelisme di Balik Pembentukan Koalisi

Berdasarkan teori koalisi rasional, berangkat dari asumsi bahwa partai politik adalah aktor rasional yang bertindak untuk memaksimalkan manfaat kekuasaan. Riker (1962), sesuai *The Theory of Political Coalitions*, Riker menerangkan bila partai akan berupaya membentuk koalisi menang minimal (*minimum winning coalition*). Artinya, partai hanya mengundang sekutu yang diperlukan untuk membentuk mayoritas, demi meminimalkan pembagian *payoff*. Dalam kutipannya yang terkenal, Riker menulis; “*Politicians are rational maximizers of their utility, seeking minimal winning coalitions that deliver power and resources*”. Akan tetapi, konteks Indonesia menunjukkan deviasi sistematis seturut teori tersebut. Sistem presidensial multipartai dan patronase yang kuat, justru membuat praktik pembentukan koalisi cenderung melampaui kebutuhan minimal. Fenomena ini, disebut Mietzner (2013) sebagai “*over sized coalitions*”, di mana aktor politik lebih memilih stabilitas jangka pendek dan akses sumber daya negara daripada mengefisiensi koalisi minimal.

Aspinall dan Berenschot (2019) memperkuat temuan itu, dengan menjelaskan bahwa koalisi gemuk di Indonesia bukan hanya instrumen stabilitas politik formal, tetapi mekanisme distribusi patronase yang mana partai peserta memperoleh jatah posisi strategis, proyek, atau akses fiskal. Inilah yang kemudian membuat oposisi sulit bertahan lama dikarenakan biaya politik menolak patronase lebih tinggi daripada insentif ideologis menjadi oposisi permanen. Disinilah PDIP; meski memiliki basis ideologi marhaenis; realitasnya mengesampingkan fleksibilitas koalisi yang tinggi demi meminimalkan risiko kehilangan akses sumber daya di birokrasi (Winters; 2011). Sementara di satu sisi, PKS

merupakan partai yang relatif bersih dan profesional tidak terlihat sensitif atas logika pembagian jabatan (*power-sharing*), apabila imbal balik kekuasaan dirasa sepadan dengan biaya moral menjadi oposisi.

Gagasan dari koalisi rasional juga relevan dibaca melalui kerangka teori klientelisme. Kitschelt dan Wilkinson (2007) mengemukakan, di negara-negara demokrasi baru, koalisi partai seringkali diikat bukan oleh platform kebijakan yang koheren, melainkan oleh jaringan patron-klien yang memastikan aliran sumber daya negara ke basis pendukung. Hal itulah yang terjadi di Indonesia. Di mana, insentif institusional untuk membentuk oposisi permanen lemah karena *cost-benefit calculation* lebih menguntungkan koalisi besar. Oleh karenanya, membaca arah politik PDIP dan PKS pasca pemilu 2024 melalui lensa teori koalisi rasional, menuntut adanya refleksi kritis; apakah keduanya berani membayar biaya politik menjadi oposisi substantif atau tetap bermanuver di tengah prinsip *oversized coalition* demi menjaga stabilitas kekuasaan yang semu.

Patronase Politik dan Oligarki Elektoral

Merujuk pelbagai literatur demokrasi, pasca-reformasi, patronase di Indonesia sering disebut sebagai urat nadi politik elektoral yang menjembatani relasi dan kepentingan para elite; baik partai dan juga negara. Patronase pada hakikatnya merupakan pola relasi yang menguntungkan satu sama lain, sekaligus berbasis pertukaran sumber daya negara dengan loyalitas politik. Hadiz (2004) mengemukakan, apabila optimisme neo-institusionalis yang terlalu menitikberatkan prosedur elektoral, justru akan luput membaca bagaimana jaringan patron-klien membajak demokrasi dari dalam. Jeffrey Winters (2011) menambahkan, jika patronase bukan saja relasi antara elite partai dengan konstituen, harus dilihat juga sebagai instrumen utama oligarki elektoral, artinya akumulasi dan sirkulasi kekuasaan ada di tangan segelintir aktor ekonomi dan politik. Winters menulis; "*Oligarchs use elections to legitimize control, but real power flows through informal patronage networks that render formal institutions subordinate*". Sesuai uraian tersebut, pemilu, parlemen, bahkan oposisi begitu mudah untuk dikooptasi menjadi mekanisme reproduksi oligarki.

Realitas yang terjadi hari ini, *clientelism* di Indonesia menjelma dalam bentuk koalisi pragmatis, pembagian posisi strategis, dan aliran rente birokrasi yang memastikan loyalitas elite partai. Aspinall dan Sukmajati (2016) menerangkan, sejatinya partai-partai di Indonesia cenderung bertransformasi layaknya kendaraan patronase; elite partai menjanjikan program, proyek, sekaligus akses jabatan sebagai sebagai balas budi dukungan politik. Di parlemen, ini memengaruhi perilaku oposisi. Tanpa insentif material, oposisi substantif hampir selalu rapuh di hadapan daya tawar patronase eksekutif.

Penjabaran di atas, merupakan “tampanan” atau dilema bagi PDIP dan PKS. PDIP, sejak awal reformasi, menggunakan patronase birokrasi sebagai basis dan sumbu konsolidasi kekuasaan, termasuk menggembose jabatan di kementerian, BUMN, hingga birokrasi lokal (Mietzner; 2013). Penurunan dukungan pada Pemilu 2024, setidaknya telah menekan PDIP agar mempertahankan *state resources* demi menjamin kelangsungan patronase-nya. Dengan demikian, posisi oposisi bagi PDIP tidak hanya sikap ideologis, tetapi juga risiko melepas akses terhadap sumber daya negara. Begitu dengan PKS, yang tidak sepenuhnya steril. Meski diidentifikasi sebagai partai dengan citra bersih, tetapi berdasarkan hasil studi Ufen (2008) memperlihatkan jika PKS seakan berupaya menegosiasikan *moral capital*—nilai religiusitas dan kedisiplinan kader—dengan tawaran *power-sharing* dalam kabinet atau alokasi program yang sektoral. Konsekuensinya, bahwa patronase memaksa PKS menimbang ulang pilihan menjadi oposisi yang kokoh.

Berangkat dari kajian teoritis dari uraian sebelumnya, mengapa garis demarkasi antara oposisi dan koalisi di Indonesia teramat dinamis. Di mana komitmen ideologis sering kalah oleh insentif distribusi politik rente. Membaca analisis Törnquist (2002), demokrasi elektoral Indonesia hanya menghasilkan oposisi yang lemah sebab struktur klientelisme menegasikan keberanian partai untuk terlepas dari jeratan patronase. Refleksi pentingnya, bilamana logika patronase tetap saja mendominasi, maka fungsi oposisi yang dipahami sebagai *watchdog*-nya demokrasi, hanya menjadi jargon prosedural tanpa adanya substansi. Masa depan demokrasi Indonesia, dengan demikian, sangat ditentukan oleh keberanian elite-elite partai untuk keluar dari logika klientelistik dan menegakkan oposisi sebagai sikap politik yang rasional, legal, sekaligus etis.

Konfigurasi Elektoral PDIP dan PKS Pasca Pemilu 2024

Hasil pemilu 2024 menegaskan tren erosi loyalitas pemilih tradisional PDIP, terutama di Jawa Tengah yang disebut sebagai *kandang banteng*. Menurut hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2024), perolehan suara PDIP di Jawa Tengah turun dari 33% (2019) menjadi sekitar 24–25% (2024).

Gambar 1. Indeks Perolehan Suara PDIP Secara Nasional dari Pemilu Tahun 1999-2024



Sumber: Diolah dari Litbang Kompas dan KPU RI

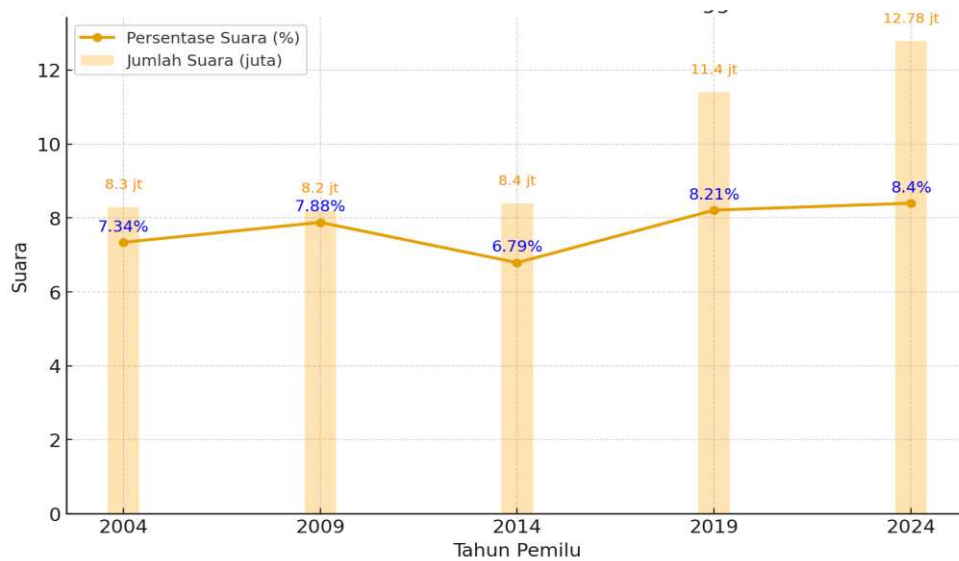
Penurunan tersebut, beririsan dengan kajian Burhanuddin Muhtadi (2024) yang menyebutkan ada tiga variabel krusial; melemahnya mesin partai di level akar rumput, pecahnya dukungan elite lokal, sekaligus naiknya segmentasi pemilih muda yang cenderung *floating voters*. Penurunan loyalitas ini mendukung tesis Mietzner (2013), bahwa dominasi partai nasionalis seperti PDIP tidak lagi diikat oleh *solid ideological cleavage*, melainkan bergantung pada *clientelistic mobilization*. Di level lokal, pembelahan elite juga memainkan peran kunci. Sebagaimana hasil studi Buehler (2013) tentang politik patronase di Jawa Tengah, yang memperlihatkan “broker politik” di tingkat desa/kecamatan menjadi perantara konsolidasi suara. Manakala patron lokal beralih afiliasi, maka fragmentasi basis pun tidak terelakkan. Penetrasi media sosial dan digitalisasi kampanye turut mendorong *volatility* pemilih muda. Berdasarkan Data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC; 2024) menunjukkan hampir 35% pemilih

generasi Z dan milenial tidak loyal pada satu partai tertentu. Mereka lebih terpengaruh narasi figur kandidat presiden/wakil presiden dan konten digital, bukan lagi ikatan ideologis partai. Gambaran demikian, setidaknya mengkonfirmasi, apabila identitas politik di Indonesia sesudah era reformasi semakin berkarakter *personality-centered* daripada *party-centered*.

Sementara itu, PKS berhasil mencatatkan tren kenaikan meski dalam skala moderat. Hasil KPU (2024) menampilkan, jika PKS meraih suara nasional di kisaran 9–10%, naik dari sekitar 8,2% pada pemilu 2019. Kenaikan kecil ini bersumber dari penguatan basis pemilih perkotaan, khususnya di daerah Jakarta, Jawa Barat, dan kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Penelitian SMRC (2024) menerangkan, hakikatnya PKS juga berhasil menarik segmen kelas menengah religius yang tumbuh seiring meluasnya jaringan “pengajian urban dan komunitas hijrah digital” (Syafuri, 2025). Selain dari faktor ideologis, strategi *digital engagement* PKS menjadi agenda penting. Lebih lanjut, temuan dari SMRC (2024) memperlihatkan intensitas kampanye digital PKS di platform media sosial tumbuh hampir 2 kali lipat dibanding 2019. Penggunaan *meme warfare*, *micro-influencer*, dan *content creator* internal PKS mendekatkan partai ke segmen *muda religius perkotaan*. Hal ini sejalan dengan wacana sosial yang menilai PKS adaptif sebagai partai Islam modernis yang cakap menggabungkan *moral capital* dengan inovasi teknologi politik.

Meskipun PKS mengalami kenaikan, posisinya belum cukup kuat untuk menjadi *king maker* yang menentukan arah koalisi tanpa mitra. Model *minimum winning coalition* (Riker; 1962) hampir tak pernah diterapkan penuh dalam sistem presidensial multipartai Indonesia. Sebaliknya, dominasi koalisi super-besar atau *rainbow coalition* (Aspinall & Berenschot; 2019) cenderung meminggirkan partai dengan perolehan suara sedang, kecuali jika memiliki nilai tawar ideologis, moral, atau massa yang militan. Dalam konteks pasca Pemilu 2024, PKS dihadapkan pada tawaran menjadi *penyeimbang loyal* (*loyal opposition*) atau mitra kabinet (KIM-Plus).

Gambar 2. Indeks Perolehan Suara PKS Secara Nasional dari Pemilu Tahun 2004-2024



Sumber: Diolah dari Tempo dan KPU RI

Penawaran kursi kementerian sektoral ataupun konsesi kebijakan isu Islam moderat (pendidikan, dakwah, subsidi keumatan) seringkali menjadi *trade-off*. Bilamana PKS masuk koalisi, peluang membangun oposisi moral kian sempit. Sebaliknya, jika menolak, *political cost* berupa marginalisasi akses patronase harus dibayar mahal (Hadiz, 2004). PDIP pun hadapi skenario yang serupa. Posisi sebagai partai besar non-pengusung presiden terpilih memaksa PDIP bernegosiasi ulang untuk menjaga *leverage* melalui jalur koalisi kompromi maupun oposisi konstitusional. Sartori (1976) menegaskan bahwa oposisi bukanlah sekadar absensi kekuasaan, tetapi *institutionalized resistance* yang berfungsi menjaga pluralitas suara publik. Namun, jika patronase tetap dominan, maka garis batas oposisi-koalisi akan terus cair (Törnquist; 2002).

Selain daripada itu, salah satu tantangan terbesar bagi masa depan PDIP dan PKS pasca pemilu 2024 adalah rapuhnya fondasi mesin politik di tingkat lokal. Berdasarkan kajian tentang partai politik Indonesia setelah reformasi, persoalan lemahnya institusionalisasi partai di level akar rumput sudah lama disorot (Hadiz; 2004, Mietzner; 2013). Untuk PDIP, basis elektoral organik di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dulunya kuat berkat narasi Sukarnoisme, retorika marhaenisme dan warisan politik anti orde baru

(Aspinall; 2005). Namun seiring normalisasi demokrasi elektoral, ikatan ideologis perlahan tergeser oleh praktik patronase dan mobilisasi berbasis broker lokal.

Hadiz (2004) menerangkan, sejatinya di tingkat lokal, loyalitas pemilih seringkali dipelihara melalui patronase *ad hoc*, mulai dari proyek desa, bantuan sosial, sampai pada janji distribusi jabatan di pemerintahan daerah. Warburton (2016) ikut menambahkan, para politisi daerah kerap membangun *mini fiefdoms*, di mana loyalitas akan lebih bertumpu pada relasi patron-klien ketimbang platform ideologis. Akibatnya, mesin PDIP rentan terfragmentasi ketika patron-patron lokal bergeser dukungan, terutama menjelang pemilu yang makin mahal secara biaya (Aspinall & Sukmajati; 2016). Fenomena *candidate-centered campaigning* pun semakin menguat (Ufen; 2008). Alih-alih mengandalkan instrumen partai yang solid, banyak caleg PDIP bertumpu pada jaringan keluarga, tokoh agama lokal, dan relawan pribadi. Fragmentasi ini semakin diperparah oleh tumbuhnya *local kingpins* atau *political dynasties* (Buehler; 2013). Di beberapa kabupaten, kepala daerah terafiliasi PDIP lebih bergantung pada patronase birokrasi ketimbang penguatan narasi ideologi. Sebagai akibatnya, suara PDIP di basis tradisional mulai tergerus, terutama di kantong-kantong Jawa Tengah bagian selatan dan bagian pesisir utara, di mana pesaing seperti Gerindra dan PKB berhasil memanfaatkan celah fragmentasi dengan pendekatan *cross-cutting cleavages* (Warburton, 2016).

Di sisi lain, PKS menghadapi kerentanan dengan karakteristik berbeda. Sebagai partai yang bertumpu pada basis urban Islam modernis, PKS relatif mapan di kawasan metropolitan dan suburban. Tren kebangkitan *Islamic revivalism*—termasuk fenomena *hijrah movement* dan komunitas-komunitas dakwah digital—sempat menjadi modal politik PKS untuk memelihara *moral capital* di tengah kelas menengah Muslim perkotaan (Syafuri; 2025). Meski demikian, basis ini juga sangat cair. SMRC (2024) menemukan, apabila generasi pemilih di wilayah urban itu cenderung rasional dan menuntut konsistensi moral, transparansi, serta komitmen antikorupsi. Kekecewaan pada elite PKS yang pernah terlibat kompromi jabatan menjadi celah bagi partai Islam pesaing seperti PAN, PPP, bahkan partai nasionalis “berwarna hijau” seperti PKB dan Nasdem untuk membajak segmen ini. Tidak hanya itu saja, tantangan PKS di tingkat lokal juga berkaitan dengan logika klientelistik. Meski sering diklaim lebih disiplin dan profesional, patronase itu tetap hadir di wilayah basis, misalnya lewat alokasi program dakwah dan ragam

proyek pendidikan yang bergantung terhadap relasi eksekutif di daerah (Hadiz; 2004). Ketika PKS memilih jalur oposisi penuh, tak dapat dipungkiri keran patronase berkurang. Konsekuensinya, partai harus membangun loyalitas massa tanpa insentif material yang selama ini menopang kerja mesin politik.

Fragmentasi basis PDIP maupun PKS membuka ruang kompetitor. Di kantong PDIP, Gerindra, PKB, dan Golkar semakin agresif dengan model kampanye langsung dan program bansos. Di kantong PKS, partai Islam baru dan gerakan dakwah digital mampu menawarkan *narrative hijrah* yang lebih fleksibel. Jika tidak dikelola, kondisi ini akan memperdalam paradoks demokrasi elektoral sebagaimana diingatkan Törnquist (2002): multipartai tanpa institusionalisasi lokal yang solid hanya melanggengkan *clientelistic democracy*. Ketika patronase menjadi tulang punggung, komitmen ideologi kalah oleh insentif rente. Akibatnya, oposisi substantif rapuh dan mudah terserap koalisi pragmatis di pusat (Hadiz; 2004, Winters; 2011). Dengan demikian, fragmentasi mesin politik di basis tradisional dan ideologis tak sekadar masalah teknis logistik kampanye, tetapi mencerminkan kerentanan struktural partai dalam menghadapi dilema, bertahan sebagai oposisi yang solid atau berkompromi sesuai logika koalisi besar demi menjamin kelangsungan politik patronase. Keberanian memperkuat struktur lokal, mendisiplinkan kader, dan menghidupkan kembali narasi ideologis menjadi penentu apakah PDIP dan PKS akan tampil sebagai penyeimbang demokrasi yang substantif atau semata bagian dari oligarki elektoral yang terus mereproduksi koalisi pragmatis tanpa oposisi yang bermakna.

4. KESIMPULAN

Analisis terhadap dinamika politik PDIP dan PKS pasca-Pemilu 2024, menunjukkan bahwa kedua partai berada pada persimpangan strategis yang menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Temuan utama dari kajian ini menegaskan tiga hal penting. Pertama, arah politik PDIP dan PKS tidak sebatas ditentukan oleh kalkulasi elektoral atau pertimbangan ideologis. Sebaliknya, oleh konfigurasi kekuasaan nasional yang ditandai dengan menguatnya *oversized coalition* dan menyempitnya ruang oposisi formal. Kedua, narasi yang berkembang di tingkat elite, memperlihatkan adanya ketegangan antara identitas ideologis dan insentif patronase yang mengiringi konsolidasi

pemerintahan. Ketiga, demokrasi elektoral Indonesia menunjukkan, kerentanan mendasar ketika oposisi tidak memiliki fondasi organisatoris dan basis dukungan yang solid di tingkat akar rumput, sehingga keputusan politik di pusat tidak selalu mencerminkan kapasitas institusional untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten.

Kontribusi kajian ini, terletak pada upaya mengintegrasikan analisis wacana kritis dengan pendekatan ekologi kekuasaan partai, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana elite PDIP dan PKS mengonstruksi posisi politiknya dalam konteks demokrasi Indonesia setelah Pemilu 2024. Dengan mengungkap relasi antara narasi publik, orientasi ideologis, serta tekanan patronase, penelitian ini memperluas diskusi tentang oposisi di Indonesia yang selama ini lebih banyak berfokus pada perilaku legislatif atau dinamika elektoral semata. Selain itu, riset ini menawarkan perspektif kritis, seyogyanya keberlangsungan oposisi tidak cukup dibaca sebagai pilihan elite, akan tetapi sebagai hasil interaksi struktur kekuasaan, infrastruktur partai, maupun tekanan publik yang bekerja secara simultan.

Meskipun demikian, keterbatasan kajian ini perlu diakui. Yang pertama, analisis lebih banyak bertumpu pada produksi wacana elite sehingga belum menggambarkan secara utuh bagaimana dinamika internal partai di tingkat daerah, kaderisasi, hingga kinerja organisasi mempengaruhi keputusan oposisi atau koalisi. Kedua, kajian ini belum memanfaatkan data longitudinal mengenai perilaku legislatif PDIP dan PKS pasca-Pemilu 2024, karena dinamika politik masih terus berkembang. Alhasil kesimpulan yang dapat dihasilkan bersifat sementara (*provisional*). Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam, bagaimana faktor eksternal, termasuk tekanan dari oligarki, *framing* pemberitaan media, dan perubahan lanskap politik digital, berkontribusi membentuk orientasi politik terhadap kedua partai.

Oleh karenanya, perkembangan sikap politik PDIP dan PKS sejauh ini hanya dapat dipahami melalui analisis yang menempatkan patronase antara elite, institusi, dan basis sosial sebagai satu kesatuan. Temuan-temuan tersebut, menunjukkan apabila masa depan demokrasi prosedural Indonesia ditentukan bukan hanya oleh pilihan politik dua partai besar tersebut, tetapi oleh kapasitas mereka untuk membangun konsistensi ideologis, memperkuat struktur organisasi, sekaligus mempertahankan otonomi dari tekanan klientelistik. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji bagaimana dinamika

ini akan berkembang dalam praktik legislasi, pengawasan, dan partisipasi politik di tahun-tahun mendatang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. California: Stanford University Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 55(3). Diakses dari: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Buehler, M. (2013). *Married with children*. Inside Indonesia. Diakses dari: <https://www.insideindonesia.org/archive/articles/married-with-children>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. New York: Longman.
- Hadiz, V. R. (2004). *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*. *Development and Change*, Vol. 35(4). Diakses dari: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2009). *Patrons, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. North Carolina: Cambridge University Press.
- Kompas.com. (2024, 16 Februari). *Ini Hasil Suara PDI-P sejak Pemilu 1999 hingga 2024*. Kompas Tren. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/16/183000165/ini-hasil-suara-pdi-p-sejak-pemilu-1999-hingga-2024?page=all>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI. Diakses dari: <https://www.kpu.go.id>
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.

- Norton, P. (2008). *Making Sense of Opposition*. The Journal of Legislative Studies, 14(1-2), 236–250. Diakses dari: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13572330801921257>
- Riker, W. H. (1962). *The Theory of Political Coalitions*. New Haven: Yale University Press.
- Sartori, G. (2006). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saiful Mujani Research and Consulting. (2024). *Laporan Survei Nasional Perilaku Pemilih Pemilu 2024*. Jakarta: SMRC. Diakses dari: <https://saifulmujani.com/>
- Syafuri, H. B. (2025). *Fiqih siyasah di era globalisasi*. Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja.
- Tempo.co. (2024, 22 April). *22 Tahun PKS, Capaian dari Pemilu 2004 sampai Pemilu 2024*. Tempo. Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/22-tahun-pks-capaian-dari-pemilu-2004-sampai-pemilu-2024-66104>
- Törnquist, O. (2002). *Popular Development and Democracy: Case Studies with Rural Dimensions in the Philippines, Indonesia and Kerala*. Journal of Contemporary Asia, 34(2). Diakses dari: <https://www.proquest.com/openview/f1990225af7fea23c8d4cf34a5da139e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=47451#:~:text=On%20the%20basis%20of%20his,%2C%20e.g.%2C%20elections%20and%20governance.>
- Ufen, A. (2008). *Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and 'Philippinisation'*. GIGA Working Papers, 75, German Institute of Global and Area Studies. Diakses dari: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/47762/1/605330638.pdf>
- Warburton, E. (2016). *Jokowi and the New Developmentalism*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 52 (3). Diakses dari: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2016.1249262>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Illinois: Cambridge University Press.